

## Tinjauan Teori dan Konsep Penerapan Etika Teknologi pada Layanan Publik E-Government yang Diberikan oleh Akuntan Pemerintah (Review of Theories and Concepts Regarding the Application of Technology Ethics in E-Government Public Services Provided by Government Accountants)

Afifatul Fitria<sup>1\*</sup>, Intan Roisah M<sup>2</sup>, Inayatul M<sup>3</sup>, Dhaiviatul Hasanah<sup>4</sup>,  
Hanif Puji T<sup>5</sup>, Sonya Emilia I<sup>6</sup>, Taufiqurrozzaq<sup>7</sup>, Siti Noer H<sup>8</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember

[\\*afifatul19@gmail.com](mailto:*afifatul19@gmail.com)

### Abstrak

Pelayanan publik di Indonesia masih memprihatinkan terlihat dari layanan publik yang tidak sesuai, tertutup, tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai, usang, dan tidak responsive. Adanya kekhawatiran mengenai kurangnya sensitivitas publik, masalah aksesibilitas yang memengaruhi hubungan profesional antara pegawai negeri dan penerima layanan, serta persepsi korupsi, menuntut e-government menjadi lebih mahir dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan penyedia layanan publik dapat meningkatkan kinerja pejabat publik dan mengurangi korupsi, yang dapat dipantau secara akurat dengan mengikuti prinsip-prinsip antikorupsi. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan analisis naratif dan konseptual yang menggabungkan adaptasi humanistik, interpretasi, dan eksplorasi yang mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat perlu menerima informasi yang berguna dari laporan keuangan dalam inisiatif e-government. Tidak hanya tentang pembukuan dana negara, tetapi juga tentang menjaga kerahasiaan, mengelola anggaran secara efisien, dan melaporkan informasi keuangan secara objektif, akurat, dan profesional dalam akuntansi pemerintahan. Harapan publik terhadap pekerjaan akuntan pemerintah sebagai pelayan publik dan untuk mengatasi isu-isu etika yang kompleks seputar penggunaan teknologi informasi. Sebagai penelitian yang bersifat teoritis dengan membahas isu-isu etika, penelitian ini masih terdapat kekurangan literatur mengenai etika teknologi dan penelitian dan pengembangan terkait isu-isu etika dalam penggunaan teknologi pelayanan publik di Indonesia. Sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambah dan memperluas literatur melalui sumber-sumber yang jelas dan akurat.

**Kata Kunci:** Pelayanan publik, e-government, akuntansi pemerintahan.

### Abstract

*Public services in Indonesia are still worrying, as seen from public services that are inappropriate, closed, not equipped with adequate equipment, outdated and unresponsive. Concerns regarding a lack of public sensitivity, accessibility issues affecting professional relationships between civil servants and service recipients, and perceptions of corruption, require e-government to become more adept at overcoming these difficulties. So, with this research, it is hoped that public service providers can improve the performance of public officials and reduce corruption, which can be monitored accurately by following anti-corruption principles. The method used is a qualitative approach with narrative and conceptual analysis that combines humanistic adaptation, interpretation and in-depth exploration. The research results show that the public needs to receive useful information from financial reports in e-government initiatives. Not only about bookkeeping of state funds, but also about maintaining confidentiality, managing budgets efficiently, and reporting financial information objectively, accurately, and professionally in government accounting. Public expectations of government accountants' work as public servants and to address complex ethical issues surrounding the use of information technology. As theoretical research discussing ethical issues, this research still lacks literature regarding technology ethics and research and development related to ethical issues in the use of public service technology in Indonesia. So it is hoped that future researchers will add and expand the literature through clear and accurate sources.*

**Keywords:** Public service, e-government, government accounting.

## **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik di Indonesia masih mengundang keprihatinan. Hal ini mencakup layanan publik yang tidak sesuai, tertutup, tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai, usang, dan tidak responsif. Dalam kondisi saat ini, ada kekhawatiran tentang kurangnya sensitivitas publik, masalah aksesibilitas yang memengaruhi hubungan profesional antara pegawai negeri dan penerima layanan, dan persepsi korupsi. Serta masalah-masalah lain seperti jaminan keamanan dan privasi, potensi ketidaksetaraan dalam mengakses informasi publik, informasi web yang tidak dapat diandalkan, dan agenda tersembunyi kelompok pemerintah yang dapat memengaruhi dan memanipulasi opini publik yang juga menjadi perhatian. Sehingga dengan adanya e-government sebagai upaya yang diambil pemerintah dengan penggunaan teknologi informasi dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini. (Alshibly & Chiong, 2015) (Waller & Genius, 2015)

Warga negara harus semakin banyak berkomunikasi dengan pemerintah melalui media elektronik, yang dapat mengurangi privasi. E-government menghemat uang tapi membutuhkan pembiayaan yang signifikan, terutama untuk infrastruktur sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia (Waller & Genius, 2015; Siddiquee, 2016). Kelompok oposisi pemerintah juga meragukan transparansi pemerintah karena pemerintah mengelola informasi, yang memungkinkan informasi untuk ditambahkan atau dihapus dari pandangan publik tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban khusus dari organisasi/lembaga terkait, serta pelacakan informasi yang masuk dan keluar (Madzova et al., 2013). Rahman (2011) mengidentifikasi beberapa hambatan dalam e-government di Indonesia, termasuk pendanaan yang tidak mencukupi, sumber daya manusia yang berkualitas rendah, penetrasi TIK yang rendah, kurangnya dasar hukum dan peraturan, kendala budaya, kesulitan teknis, dan kesenjangan digital. Menurut Yang dan Rho (2007), e-government tidak dapat berfungsi tanpa faktor manusia, dan pengembangannya membutuhkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, seperti keahlian dan pengetahuan pengguna, kesadaran teknologi informasi, dan inisiatif. Pengembangan e-government yang tidak tepat dapat menghambat akuntabilitas dan rasionalitas instrumental, lebih mengutamakan staf sektor publik daripada efisiensi dan layanan warga (Chen, 2013; Petrakaki, Hayes, & Introna, 2009).

Karena sumber daya manusia merupakan faktor keberhasilan adopsi e-government, maka diperlukan sistem kontrol yang memadai untuk mendukung perencanaan, implementasi, dan evaluasi e-government untuk memahami tuntutan warga negara dan mencapai tujuan pemerintah yang berpusat pada warga negara (Sánchez-Torres & Miles, 2017). Hal ini juga termasuk etika teknologi oleh organisasi dan kewarganegaraan bagi penyedia layanan publik untuk meningkatkan kinerja pejabat publik dan mengurangi korupsi, yang dapat dipantau secara akurat dengan mengikuti prinsip-prinsip antikorupsi (Thitinan & Chankoson Khunanon, 2022).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Iong & Phillips (2022) e-government dapat meningkatkan efisiensi biaya, kecepatan operasional, transparansi, akuntabilitas, dan hubungan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan, seperti warga negara, bisnis, dan organisasi sektor ketiga. Berikut peranan e-government sebagai solusi dari kesulitan-kesulitan dalam mewujudkan tujuan-tujuan di atas:

1. E-government dan Korupsi

E-government dapat mencegah korupsi dengan meningkatkan keterbukaan data dan menurunkan asimetri pengetahuan dalam penegakan hukum, transaksi, dan kebijakan.

Karena setiap orang memiliki akses ke informasi yang sama, transparansi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berorientasi pada warga dengan meminimalkan pemborosan pemerintah dan rintangan administratif bagi penduduk dan perusahaan, sehingga mencegah korupsi (Agbozo & Asamoah, 2019). Cho (2017), Hartanto dkk. (2021), Haque & Pathrannarakul (2013). Kerr & Khorana (2021) (Von Haldenwang, 2004). Selama pandemi COVID-19 dari tahun 2019 hingga 2022, e-government menjadi platform utama untuk layanan publik selama pembatasan sosial berskala besar atau jaga jarak fisik, meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik, memastikan keakuratan dan aksesibilitas, dan menambah nilai layanan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah sambil memantau kinerja departemen, yang dapat mengurangi korupsi. Titinan & Chankoson Khunanan (2022) E-government dapat mengurangi korupsi, tetapi tanpa akuntabilitas yang memadai, hal ini dapat menciptakan peluang korupsi baru. E-government mungkin tidak dapat mengurangi tingkat korupsi, yang bergantung pada aspek sosial-politik, budaya, dan ekonomi masing-masing negara. Tingkat korupsi suatu negara dan lembaga-lembaga nasional yang relevan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membatasi korupsi (Sadik-Zada et al., 2022). Khan dkk. (2021).

2. E-government dan Akuntabilitas

Menurut Sugiarto (2017), Governmental Accounting Standards Board (GASB) menekankan bahwa pelaporan keuangan pemerintah didasarkan pada akuntabilitas, yang melibatkan pengungkapan pembiayaan dan penggunaan sumber daya kepada publik. Lebih dari sekadar metode akuntabilitas yang terkomputerisasi, partisipasi warga dalam alokasi sumber daya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap program tata kelola pemerintah. Warga negara dapat mempengaruhi keputusan pemerintah karena pemerintah dapat mengumpulkan dan mengorganisir kepentingan untuk mencapai konsensus mengenai kebijakan dan pengelolaan lembaga dan struktur rezim berdasarkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi (Jreisat, 2004). E-government mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dengan memodernisasi dan merasionalisasi administrasi publik serta membina hubungan pemerintah-warga negara, khususnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan opini dan proses pengambilan keputusan yang transparan, yang dapat membangun kepercayaan publik. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk berkomitmen pada kesejahteraan yang setara dan kebijakan publik yang komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan (Castro & Lopes, 2022; Hartanto et al., 2021; UNDSCHUH-RESENER, 2008).

3. E-government Sebagai Teknologi Informasi

Di era digital, masyarakat Indonesia menggunakan teknologi informasi untuk memahami tugas-tugas pemerintah, termasuk evaluasi dan pemantauan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama untuk pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencantumkan dua prinsip pelayanan publik yang terkait dengan teknologi informasi: kelengkapan infrastruktur dan kemudahan akses. Prinsip-prinsip ini mendukung tujuan e-government dan mempermudah evaluasi implementasi (Suhardi et al., 2015). Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja pegawai pemerintah, pemerintah harus meningkatkan lingkungan kerja yang berhadapan langsung dengan publik. Peningkatan kualitas layanan pegawai pemerintah membantu mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Junidis, 2015).

4. Etika Teknologi untuk E-Government

Teknologi sering dilihat sebagai sesuatu yang tidak bermoral dan tidak berjiwa, terputus dari kesadaran. Kesadaran manusia dapat menghasilkan teknologi, oleh karena itu keduanya saling terkait (Suamba, 2020). Menurut Dharmawan (2018), Bertens mendefinisikan etika sebagai praktik dan refleksi yang memastikan semua perilaku dan sikap sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral sosial, yang memandu apa yang benar atau salah, dapat diterima atau tidak dapat diterima, atau harus atau tidak boleh dilakukan. Etika teknologi adalah bidang multidisiplin yang menggunakan teori dan pendekatan dari komunikasi, ilmu informasi, ilmu sosial, teknologi, etika praktis, dan filsafat untuk memahami aspek-aspek etika dari sistem dan praktik teknologi untuk memajukan kemajuan teknologi di masyarakat, menurut Luppacini (2010). Valkenburg (2013) membagi implikasi etis dari technoethics terkait keterbukaan informasi ke dalam dua dilema: (1) ambiguitas tentang apa yang harus diungkapkan versus apa yang dapat menyebabkan kerugian, dan (2) gagasan bahwa teknologi bersifat netral, tidak memihak, dan tidak dapat diganggu gugat selama tidak melanggar hak asasi manusia. Konsep ini dapat menjangkau dua disiplin ilmu yang saling bersaing, dan tantangan-tantangan ini harus dieksplorasi dan dibawa kembali ke tingkat konseptual yang membutuhkan pembenaran publik. Prinsip-prinsip biaya-manfaat, kehati-hatian, keberlanjutan, otonomi, dan keadilan dalam etika teknologi diuraikan secara geometris oleh Peterson (2018).

Teknologi dapat menyebabkan dilema etika (Brey, 2012). Apakah teknologi hanya memfasilitasi pertumbuhan atau meningkatkan kehidupan manusia dengan menanamkan, menghormati, atau mencerminkan cita-cita moral seperti kesejahteraan, kebebasan, dan banyak lagi adalah pertanyaan etis. Teknologi harus dinilai untuk memastikan bahwa teknologi tersebut bermanfaat bagi pengguna dan tidak merugikan non-pengguna (Oosterlaken, 2015). Sulit untuk mengatakan apakah teknologi membatasi atau memberdayakan. Teknologi dapat dimulai sebagai basis data dan menjadi algoritme yang mengotomatiskan keputusan dan penilaian manusia. Karena aturan desain teknologi bergantung pada para profesional TI dan bukan pekerja sosial, hal ini dapat menyebabkan manipulasi informasi dan ketidakefektifan (Buffat, 2015). Tanpa standar kerja sama sistem, informasi layanan e-government yang terbuka, kontrol auditor yang memadai, pengurangan kesenjangan digital, sistem yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, standar hukum yang kuat, dan literasi digital yang rendah, masyarakat dapat kehilangan minat terhadap pengetahuan digital dan teknologi informasi. Masyarakat mungkin lebih memilih penyelesaian masalah secara langsung (Kiliç et al., 2019). Dengan munculnya e-government (Alshibly & Chiong, 2015), isu-isu etika harus diidentifikasi dan dinilai sejak dini. Hal ini dapat membantu pengguna dan pemangku kepentingan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan moral dan mengarahkan penelitian dan penggunaan untuk mengurangi masalah etika. Meskipun penilaian bersifat spekulatif, teknologi dapat digunakan dalam pembentukan kebijakan karena perubahannya yang cepat dan efek sosialnya (Brey, 2012).

5. Implementasi E-Government

Akuntan Pemerintah Negara-negara maju secara profesional menerapkan etika teknologi melalui peningkatan kompetensi, peningkatan pedoman kebijakan, kontrol hukum, pengembangan badan pengetahuan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan, yang menyoroti aspek-aspek etika dari dampak sosial transformasi digital.

Ketika lembaga/instansi memperkuat etika mereka, kegagalan penggunaan teknologi di masyarakat akan berkurang (Thornley et al., 2018). Kurangnya penilaian moral pada awal pengembangan teknologi membuat pengembangan teknologi menjadi mahal dan sulit untuk mengatasi elemen-elemen yang tidak jelas yang terkait dengan dampak negatif teknologi (Sollie, 2007). Sollie (2007) mencantumkan dua tujuan etika teknologi: 1. Menilai dan menilai orang, kegiatan, dan lainnya dengan menggunakan kriteria yang tepat, seperti keprihatinan distributif moral substansial yang menanyakan kepentingan atau subjek siapa yang harus dipertimbangkan oleh aktor. 2. Pertanyaan etika filosofis, seperti apakah prinsip moral substantif dapat dibenarkan secara rasional, dan pertanyaan filosofi moral otoritatif, seperti mengapa seseorang harus bersikap etis, mengacu pada kriteria selain ketepatan moral yang dapat dipertanyakan. Menurut (Sollie, 2007), berbagai masalah ketidakpastian mengharuskan pendidikan, penelitian, dan pengembangan etika teknologi secara terus-menerus: a. Faktor epistemik: Satu kelompok tidak dapat mengevaluasi, memahami, dan menginterpretasikan teknologi. Durasi pembaharuan teknologi tidak diketahui dan membutuhkan keterlibatan lintas keahlian dan interdisipliner. b. Faktor ontologis: Aturan, prinsip, atau nilai mempengaruhi kerangka kerja evaluasi dasar. c. Ketidakpastian: Kurangnya konsistensi dari waktu ke waktu karena informasi/pengetahuan, kerangka kerja yang buruk, dan kontrol realitas. Menurut Sugiarto (2017), Governmental Accounting Standards Board (GASB) mewajibkan akuntan pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan. Menurut Sugiarto (2017), GASB Concepts Statement No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan cara membandingkan kinerja keuangan aktual dengan anggaran, menganalisis kondisi keuangan dan hasil operasi, menilai kepatuhan terhadap hukum keuangan dan peraturan lainnya, serta menilai efisiensi dan efektivitas. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, yang diubah dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. Akuntan pemerintah memilih informasi keuangan untuk pengungkapan publik sesuai dengan peraturan transparansi, termasuk: Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu konten yang disebut TPAD di situs web resmi pemerintah daerah, dan Instruksi Presiden No. 07 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mewajibkan semua pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan jangkauan keuangan. Resistensi terhadap transparansi laporan keuangan mencakup kekhawatiran tentang konsekuensi dari keterbukaan informasi, keyakinan bahwa masyarakat tidak membutuhkan data keuangan, keyakinan bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman untuk memahami informasi keuangan, dan ketakutan bahwa transparansi dapat mengurangi kekuasaan dan peran elit dan pembuat kebijakan publik (Salle, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui peninjauan literatur yang menggabungkan analisis naratif dan konseptual untuk menyimpulkan bagaimana etika teknologi akuntan pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas akuntabilitas di sektor publik. Selain itu, tidak seperti penelitian kuantitatif, pendekatan penelitian ini berusaha untuk menghindari pemberian informasi yang salah dengan menggabungkan adaptasi humanistik, interpretasi menyeluruh, dan eksplorasi yang mendalam (Falla, Dueñas-Casado, & OrtegaRuiz, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbeda dengan akuntansi sektor publik, yang tidak terikat oleh kode etik tertentu, akuntan publik di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi seperangkat pedoman yang diajukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik pedoman ini terdiri dari: 1. Prinsip Integritas 2. Prinsip Objektivitas 3. Kompetensi dan Kecermatan Profesional 4. Prinsip Kerahasiaan 5. Kode Etik untuk Profesional

Bidang akuntansi lainnya, khususnya akuntansi sektor publik, sering kali menggunakan beberapa standar etika yang lebih luas. Terdapat tiga bagian dalam sektor akuntansi pemerintah: akuntan yang melakukan tugas-tugas operasional seperti mengumpulkan bukti, mencatatnya, dan mengubahnya menjadi laporan keuangan; akuntan yang duduk dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menangani masalah kebijakan; dan akuntan yang bekerja di bawah lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah menangani masalah pengawasan.

Mendorong sistem kemitraan antara organisasi pemerintah dan sektor swasta memang penting, tetapi diperlukan tindakan yang cukup besar untuk memberdayakan warga negara yang menggunakan layanan publik agar dapat mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas ahli dan menjamin demokratisasi di sektor layanan publik. Sangatlah penting bagi masyarakat untuk menerima informasi yang berguna dari laporan keuangan yang diterbitkan sebagai bagian dari inisiatif e-government, dan bukan hanya sekedar pembukuan dana negara dengan memasukkan pertimbangan moral dan etika ke dalam penganggaran, menyelaraskan kebutuhan anggaran dengan visi dan misi organisasi, dan memastikan implementasi yang efektif, kita dapat mengevaluasi etika teknologi dalam akuntansi pemerintah.

Pelaporan keuangan juga harus menunjukkan bahwa tugas-tugas dilakukan secara proporsional, profesional, dan tanpa bias. Meskipun saat ini belum ada standar etika yang terkodifikasi untuk akuntan pemerintah terkait dengan etika teknologi, "celah" ini dapat diisi dengan menggabungkan undang-undang yang ada yang mengatur keterbukaan informasi keuangan pemerintah dengan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam Profesi Akuntan Publik yang digariskan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Hal ini akan membawa kita selangkah lebih dekat pada kondisi ideal untuk etika teknologi akuntan pemerintah.

Dengan demikian, dalam akuntansi pemerintahan, etika teknologi berarti menjaga kerahasiaan dengan tetap mengungkapkan informasi secara proporsional dengan anggaran, mengelola anggaran secara efisien dan efektif, dan melaporkan informasi keuangan secara objektif, akurat, dan profesional. Etika teknologi akuntan pemerintah harus memandu pengambilan keputusan moral mereka saat mereka melaksanakan tugas mereka, yang mencakup peninjauan dan revisi secara berkala terhadap metode utama untuk menangani data keuangan dengan mempertimbangkan peraturan baru. Di sini, kepatuhan terhadap semua standar akuntansi pemerintah yang berlaku, serta prinsip-prinsip etika dan moral, adalah yang

terpenting. Sebelum melakukan sesuatu untuk menyoroti atau mengevaluasi pekerjaan keuangan, terutama ketika mengungkapkan informasi keuangan pemerintah kepada publik, akuntan pemerintah harus merefleksikan kompas moral mereka sendiri dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang etika teknologi. Hasil dari introspeksi ini akan membentuk profesionalisme pribadi akuntan pemerintah ketika mereka menjalankan tugasnya. Dengan cara yang sama, pertimbangan etika akuntan pemerintah ketika merilis laporan keuangan yang telah diaudit tidak boleh mengabaikan pentingnya data yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pemberian layanan publik di masa lalu, terutama dalam hal pembuatan kebijakan untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Lukmanul Hakim, 2022).

Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan landasan pelayanan publik dalam hal penyampaian temuan audit atas laporan keuangan. Masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab atas semua tindakannya melalui akuntabilitas. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, pemerintah harus menyusun laporan keuangan. Sejahter mana tindakan dan hasil organisasi selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diukur melalui akuntabilitas kinerja keuangan. Akuntabilitas ini ditunjukkan melalui pengungkapan informasi keuangan yang berkualitas tinggi secara teratur dan akurat kepada para pemangku kepentingan melalui saluran akuntabilitas yang telah ditentukan. Penting untuk menyediakan informasi dengan cara yang sesuai dan mudah dipahami, terutama dalam hal fiskal dan keuangan. Proses penganggaran yang transparan, jalur komunikasi yang terbuka mengenai peran dan tugas, akses publik terhadap catatan, dan jaminan kejujuran lembaga-lembaga yang tidak memihak dalam hal proyeksi keuangan, data, dan penjelasan adalah cara-cara untuk mewujudkan tingkat keterbukaan ini. Transparansi dalam laporan keuangan daerah, yang dimungkinkan melalui penerapan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan, dapat diakses oleh publik melalui situs web. Hal ini mencakup segala hal mulai dari rencana anggaran pemerintah daerah hingga laporan keuangan daerah (LKPD) yang telah diaudit, serta opini auditor atas laporan tersebut. Untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta untuk menjamin stabilitas politik dan hukum, lintasan yang jelas dalam kebijakan pembangunan, dan pengelolaan keuangan yang efektif (Satia et al., 2023), maka diperlukan alat untuk memantau tata kelola dan menilai kinerja.

Oleh karena itu, akuntan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, menunjukkan akuntabilitas manajemen, dan menilai kinerja organisasi dan manajemen dalam kaitannya dengan tujuan penyusunan laporan keuangan eksternal. Tantangan dalam mengembangkan eGovernment berasal dari keengganan masyarakat untuk menggunakannya dan dari tindakan pejabat pemerintah. Beradaptasi dengan perubahan zaman dan memasukkan elemen-elemen yang membuat eGovernment dapat diakses oleh individu dari semua lapisan masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan yang terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, kesenjangan digital, dan keengganan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan eGovernment dan penetrasi TIK dalam eGovernment sebagai inovasi layanan publik akan didorong oleh meningkatnya jumlah individu yang menggunakan teknologi informasi yang mudah diakses. Solusi tambahan untuk masalah kualitas sumber daya manusia yang buruk adalah fitur yang mudah digunakan. Investor, baik swasta, BUMN, maupun internasional, dapat menjadi sumber modal yang sangat dibutuhkan. Teknisi dalam negeri akan diberi insentif untuk membangun e-Government yang mudah diakses, mudah digunakan, dan hemat biaya dengan bantuan dana untuk pendidikan dan

pelatihan. Untuk menggunakan e-Government secara legal guna mengakomodasi hak-hak dasar masyarakat, pemerintah juga harus menetapkan aturan dan ketentuan. Integrasi proses administrasi ke dalam jaringan sistem informasi online, dengan situs web yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah, merupakan komponen penting dari infrastruktur e-Government.

Selain itu, sistem ini memungkinkan berbagai lembaga federal dan negara bagian untuk bekerja sama dan menyediakan diri mereka kepada publik, terutama dalam hal layanan publik. Pegawai pemerintah didorong untuk beradaptasi dengan paradigma baru oleh perkembangan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi. Mereka berjuang untuk efisiensi birokrasi dan layanan yang lebih baik untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Sektor pemerintah secara aktif mendorong dan memfasilitasi keberhasilan berbagai inisiatif pembangunan, yang merupakan aspek fundamental yang harus dipahami dan dipertimbangkan oleh para pejabat ketika mengimplementasikan layanan publik berbasis e-Government. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan, diperlukan dukungan arus data dan informasi yang cepat antara berbagai institusi untuk menciptakan keselarasan sistem antara pemerintah dan pihak-pihak lain yang menggunakan layanannya.

Dengan memanfaatkan kekuatan internet, pemerintah dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses informasi formal melalui situs web, platform media sosial, atau berbagai bentuk layanan publik yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan informasi bagi masyarakat terkait kinerja pemerintah. Masyarakat dapat berpartisipasi, memantau, dan menilai kinerja pemerintah melalui akses terbuka ini. Mereka juga dapat mengevaluasi kinerja para pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola perekonomian negara. Namun, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik karena adanya kode etik kerahasiaan yang berkaitan dengan informasi keuangan. Profesi akuntan harus menyesuaikan pertumbuhan e-Government dalam badan publik dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang badan tersebut. Menurut Rumawati (2012), langkah ini diambil untuk menjamin bahwa dana publik dapat digunakan secara efektif oleh lembaga dalam peluncuran e-Government. Akibatnya, akuntansi terlibat dalam banyak aspek operasi negara. Mengontrol sumber daya moneter adalah salah satu fungsi utama akuntansi. Praktik akuntansi berisi data yang luas dan lengkap, didukung oleh bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertindak sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan ekonomi nasional (Atikah et al., 2023). Selain beroperasi sebagai alat kontrol keuangan, praktik akuntansi dalam kerangka negara juga memiliki fungsi dalam operasi, pelaporan, dan perencanaan. Semua fitur tersebut memiliki unsur yang mirip dengan indikator atau ukuran kinerja pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pelayanan publik yang dimediasi oleh teknologi informasi.

Akuntansi pemerintahan yang berkualitas dilihat dari keterlibatan praktik akuntansi pemerintahan dan seluruh laporan yang dihasilkan dalam mengelola kegiatan pemerintahan suatu negara, dengan aspek-aspek pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang tercermin dalam akuntansi, seperti akuntabilitas, transparansi, dan adopsi teknologi atau sistem akuntansi terkini dalam pelaksanaannya (Sari, 2012). Secara etis menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik di bidang informasi keuangan negara secara elektronik, akuntan pemerintah memastikan bahwa para pemangku kepentingan, terutama yang terlibat dalam pengambilan keputusan, memahami pentingnya informasi yang dipublikasikan. Pelayanan publik adalah penilaian oleh masyarakat terhadap tata kelola suatu negara. Ukuran utama kinerjanya terletak pada penggunaan anggaran untuk kepentingan publik, terutama mengenai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Keberadaan teknologi informasi dapat

mengurangi hambatan dan tantangan dalam memberikan layanan informasi laporan keuangan kepada masyarakat, yang selama ini dihadapi dalam pelayanan publik secara konvensional. Meskipun pelayanan publik dengan menggunakan e-Government melibatkan interaksi tatap muka yang minim dengan masyarakat, namun etika tetap diperlukan untuk mengontrol perilaku aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan sekaligus meminimalisir konflik yang mungkin timbul dari keterbukaan informasi publik. Hal inilah yang membuat penerapan etika teknologi berbeda dengan etika pelayanan publik konvensional karena tidak hanya menuntut kemampuan operasional tetapi juga menyangkut moral yang secara tidak langsung berhubungan dengan publik. Teknoetika akuntan pemerintah berperan sebagai jembatan antara etika akuntan umum, etika pelayanan publik, dan etika penggunaan teknologi informasi, yang kesemuanya diarahkan pada satu tujuan yaitu tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif (*good governance*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Di dunia saat ini, ketika efisiensi dan efektivitas biaya menjadi hal yang utama, keahlian akuntan pemerintah di bidang e-Government sangat berharga bagi semua organisasi negara. Ada sejumlah masalah unik yang muncul ketika mencoba melaksanakan layanan publik melalui eGovernment, yang mengurangi kebutuhan akan hubungan langsung antara warga negara dan pegawai pemerintah. Jawaban etis yang dapat memaksimalkan pemanfaatan berbagai aplikasi eGovernment adalah *technoethics*. Selain dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh perangkat TI, etika teknologi juga dapat memberikan manfaat bagi sumber daya manusia di institusi, terutama bagi mereka yang bekerja untuk pemerintah. Akuntan yang bekerja untuk pemerintah diwajibkan oleh hukum untuk menegakkan standar perilaku profesional tertinggi dalam semua aspek pelaporan keuangan, mulai dari tahap perencanaan awal hingga audit independen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Makalah ini mengangkat masalah etika karena berpendapat bahwa akuntan pemerintah memerlukan lebih banyak pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana menggunakan teknologi secara etis, terutama dalam hal pelayanan publik, dalam bentuk seminar, webinar, dan bantuan teknis.

Namun demikian, penelitian ini bersifat teoritis, dan membahas isu-isu etika-termasuk berbagai harapan untuk solusi yang efisien dan efektif-dengan meninjau literatur tentang etika teknologi. Penelitian kualitatif dan kuantitatif lebih lanjut diperlukan untuk menilai tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap etika teknologi di Indonesia. Penelitian ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan publik, terutama mengingat tingginya tingkat kepercayaan terhadap moralitas pelayan publik, terutama akuntan pemerintah, yang berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat kekurangan literatur mengenai etika teknologi dan penelitian dan pengembangan terkait isu-isu etika dalam penggunaan teknologi pelayanan publik di Indonesia. Untuk memenuhi harapan publik terhadap pekerjaan akuntan pemerintah sebagai pelayan publik dan untuk mengatasi isu-isu etika yang kompleks seputar penggunaan teknologi informasi, kami dapat menyarankan perubahan-perubahan berikut ini yang akan membantu akuntan pemerintah melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik: memberikan layanan publik yang profesional, berkualitas tinggi, dan berintegritas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agbozo, E., & Asamoah, B. K. (2019). The role of e-government systems in ensuring government effectiveness and control of corruption. *R-Economy*. 2019. Vol. 5. Iss. 2, 5(2), 53–60.
- Alshibly, H., & Chiong, R. (2015). Customer empowerment: Does it influence electronic government success? A citizen-centric perspective. *Electronic Commerce Research and Applications*, 14(6), 393–404.
- Atikah, N., Syafi'i, A., Rohimi, U. E., & Rani, P. (2023). Islamic Economic Position as a Breakfast to Reducing Inflation. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(1), 48–54.
- Basu, S. (2004). E-government and developing countries: an overview. *International Review of Law, Computers & Technology*, 18(1), 109–132.
- Brey, P. A. E. (2012). Anticipatory ethics for emerging technologies. *NanoEthics*, 6(1), 1–13.
- BUNDSCHUH-RIESENEDER, F. F. (2008). Good governance: Characteristics, methods and the Austrian examples. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 4(24), 26–52.
- Castro, C., & Lopes, C. (2022). Digital government and sustainable development. *Journal of the Knowledge Economy*, 13(2), 880–903.
- Cho, J.-S. (2017). Evolution of e-government: Transparency, competency, and serviceoriented government with Korean government 3.0. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(1).
- Haque, S., & Pathrannarakul, P. (2013). EGovernment towards good governance: A global appraisal. *Journal of EGovernance*, 36(1), 25–34.
- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23(6), 598– 616.
- Junidis. (2015). Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Kerr, W. A., & Khorana, S. (2021). Electronic Government Procurement in the EUVietnam Free Trade Agreement: An Opportunity for Increased Transparency and Accountability? *Journal of World Trade*, 55(1).
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120737.
- Lukmanul Hakim, W. (2022). Good Corporate Governance Organs, Company Size and Its Effect on Earnings Quality with Earnings Management as an Intervening Variable in Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. *Journal Of World Science*, 1(7), 533–550.
- Madzova, V., Sajnoski, K., & Davcev, L. (2013). E-government as an efficient tool towards good governance (trends and comparative analysis throughout worldwide regions and within West Balkan countries). *Balkan Social Science Review*, 1.
- Nguyen, H. N., & Tran, M. D. (2022). Stimuli to adopt e-government services during Covid-19: Evidence from Vietnam. *Innovative Marketing*, 18(1), 12.
- Peterson, M. (2018). The ethics of technology: Response to critics. *Science and Engineering Ethics*, 24, 1645–1652.
- Rahman, A. (2011). Evaluasi Kesuksesan EGovernment: Studi Di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2).
- Rimawati, Y. (2012). Keberhasilan Implementasi Elektronik Government Berdasarkan Persepsi Pengguna. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(2), 318– 333.

- Sadik-Zada, E. R., Gatto, A., & Niftiyev, I. (2022). E-government and petty corruption in public sector service delivery. *Technology Analysis & Strategic Management*, 1–17.
- Salle, A. (2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(1).
- Sánchez-Torres, J. M., & Miles, I. (2017). The role of future-oriented technology analysis in e-Government: a systematic review. *European Journal of Futures Research*, 5, 1–18.
- Satia, A., Li, B. L., Sembiring, D. T., Jaya, D., Marthino, E., & Marcus, F. (2023). FaktorFaktor yang Mempengaruhi Negosiasi dan Manajemen Konflik Pada Industri Makanan Cepat Saji. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(1), 304–311.
- Siddiquee, N. A. (2016). E-government and transformation of service delivery in developing countries: The Bangladesh experience and lessons. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 10(3), 368–390.
- Sollie, P. (2007). Ethics, technology development and uncertainty: an outline for any future ethics of technology. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 5(4), 293–306.
- Sugiarto, I. (2017). Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Rangka Membangun Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.
- Suhardi, S., Sofia, A., & Andriyanto, A. (2015). Evaluating e-government and good governance correlation. *J. ICT Res. Appl*, 9(3), 236–262.
- Thitinan, T. S., & Chankoson Khunanan, S. (2022). Modelling the impact of e-government on corruption for the COVID-19 crisis. *International Journal of EBusiness and EGovernment Studies*, 14(3), 26–45.
- Von Haldenwang, C. (2004). Electronic government (e-government) and development. *The European Journal of Development Research*, 16, 417–432.
- Waller, L., & Genius, A. (2015). Barriers to transforming government in Jamaica: Challenges to implementing initiatives to enhance the efficiency, effectiveness and service delivery of government through ICTs (e-Government). *Transforming Government: People, Process and Policy*, 9(4), 480–497.